

# Mekanisme Pelaporan Independen (IRM): Laporan Perancangan Indonesia 2018–2020

Ravio Patra, Peneliti Independen

## Daftar Isi

<b>Mekanisme Pelaporan Independen (IRM): Laporan Perancangan Indonesia 2018–2020</b>	<b>I</b>
<b>Ringkasan Eksekutif: Indonesia</b>	<b>3</b>
<b>I. Pendahuluan</b>	<b>6</b>
<b>II. Konteks Pemerintahan Terbuka di Indonesia</b>	<b>7</b>
<b>III. Kepemimpinan dan Proses Multipihak</b>	<b>10</b>
3.1 Kepemimpinan	10
3.2 Proses Multipihak dalam Penyusunan Rencana Aksi	11
<b>IV. Komitmen</b>	<b>17</b>
<b>Komitmen Pemerintah Terbuka Indonesia</b>	<b>19</b>
1. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan	19
2. Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan	24
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah	28
4. Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif	32
5. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa	35
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislati	38
7. Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	40
8. Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah	43
9. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik	45
10. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik melalui LAPOR!-SP4N	48
11. Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	51
12. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	53
13. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia	56
14. Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum	59
<b>Komitmen Parlemen Terbuka Indonesia</b>	<b>62</b>
1. Peningkatan Manajemen Data dan Layanan Informasi Legislatif	62
2. Promosi Pemanfaatan Teknologi Informasi Parlemen	65
3. Promosi Transparansi Informasi Publik Parlemen	67
4. Perumusan <i>Roadmap</i> Open Parliament Indonesia	69
5. Mendirikan Lembaga Open Parliament Indonesia	71
<b>V. Rekomendasi Umum</b>	<b>73</b>

5.1 Rekomendasi IRM	73
5.2 Tanggapan terhadap Rekomendasi Utama IRM Sebelumnya	75
<b>VI. Metodologi dan Sumber</b>	<b>76</b>
Wawancara dan Masukan Pihak-Pihak Terkait	76
Tentang Mekanisme Pelaporan Independen	78
<b>Lampiran I. Ringkasan Kinerja Indonesia dalam Penyusunan Rencana Aksi</b>	<b>79</b>



## Ringkasan Eksekutif: Indonesia

Rencana aksi kelima Indonesia mencakup komitmen yang bertujuan untuk membuka proses pemerintahan di berbagai sektor, dengan penekanan khusus pada masalah keterbukaan informasi dan tata kelola data. Rencana aksi ini juga mencakup lima komitmen dari inisiatif parlemen terbuka. Proses penyusunan rencana aksi yang kolaboratif, dengan kepemimpinan organisasi masyarakat sipil, menghasilkan dua komitmen yang dinilai memiliki potensi dampak transformatif. Penyusunan rencana aksi ke depannya dapat lebih baik jika ada kejelasan terkait peran forum multipihak, pertemuan forum yang teratur dan rutin, serta komunikasi dan keterhubungan antarlembaga yang menjamin bahwa keseluruhan proses penyusunan rencana aksi terbuka bagi seluruh pihak yang terlibat.

Open Government Partnership (OGP) adalah sebuah kemitraan global yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat sipil dalam menyusun rencana aksi untuk pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan akuntabel. Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) memonitor seluruh rencana aksi untuk memastikan bahwa pemerintah melaksanakan komitmen-komitmen mereka dengan baik. Indonesia bergabung dengan OGP sebagai salah satu pendiri pada 2011. Sejak itu, Indonesia telah menghasilkan lima rencana aksi. Laporan ini mengevaluasi perancangan rencana aksi kelima Indonesia.

### Ringkasan rencana aksi

Sekretariat Nasional (Seknas) Open Government Indonesia (OGI) melaksanakan koordinasi kegiatan OGP di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memimpin koordinasi OGI melalui forum multipihak (MSF) yang beranggotakan perwakilan pihak pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengawasi penyusunan rencana aksi.

Penyusunan rencana aksi kelima Indonesia dimulai pada Mei 2018 dalam sebuah lokakarya penyelarasan visi para pihak terkait serta pengumpulan umpan balik pihak-pihak terkait. OGI mempublikasikan informasi dan dokumentasi terkait proses penyusunan rencana aksi tersebut di laman [ogi.bappenas.go.id](http://ogi.bappenas.go.id).

Kelompok-kelompok kerja beranggotakan perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil berkolaborasi dalam menyusun komitmen-komitmen dari berbagai tema prioritas yang termasuk di dalam rencana aksi. Proses konsultasi selama penyusunan rencana aksi terpusat di ibukota

#### Tabel 1. Selayang pandang

Anggota sejak: 2011  
Rencana aksi dalam tinjauan: 2018–2020  
Jenis laporan: Perancangan  
Jumlah komitmen: 19

#### Penyusunan rencana aksi

Keberadaan forum multipihak: Ya  
Tingkat pengaruh public: Kolaborasi  
Pelanggaran proses OGP: Tidak

#### Perancangan rencana aksi

Komitmen berkaitan dengan nilai-nilai OGP: 19 (100%)  
Komitmen transformatif: 2 (11%)  
Potensi komitmen bintang: 2 (11%)

#### Pelaksanaan rencana aksi

Komitmen bintang: N/A  
Komitmen tuntas: N/A  
Komitmen dengan DIOG\* Banyak: N/A  
Komitmen dengan DIOG\* Luar Biasa: N/A

*\*DIOG: Apakah Membuka Pemerintah?*



Jakarta dengan partisipasi yang minim dari pemerintah-pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya di luar Jakarta meskipun beberapa komitmen yang dibahas spesifik menyoar keterbukaan pemerintah di tingkat daerah. Serangkaian pertemuan bilateral antara pemerintah dan masyarakat sipil beserta sejumlah pemangku kepentingan lainnya turut membantu penajaman tingkat ambisi rencana aksi ini. Akan tetapi, kepemimpinan MSF dalam proses OGP masih terbilang minim.

Pada Desember 2018, Indonesia merampungkan rencana aksi kelima berisikan 19 komitmen. Lima komitmen di antaranya merupakan bagian dari inisiatif parlemen terbuka (*open parliament*) yang disusun terpisah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Indonesian Parliamentary Center (IPC). Tema pengelolaan dan keterbukaan data masih dominan dalam rencana aksi ini, namun Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat regulasi terkait data publik terjebak dalam tarik ulur birokrasi sehingga masih belum disahkan ketika rencana aksi dipublikasikan.

Tabel 2. Komitmen unggulan

Deskripsi komitmen	Ke depannya	Status di akhir siklus implementasi
<p><b>I. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan</b></p> <p>Mendorong penggunaan basis data Kepemilikan Manfaat, terutama dalam mengoptimalkan pelaporan data pemilik manfaat di sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan..</p>	<p>Pemerintah perlu menyusun mekanisme koordinasi antarlembaga yang jelas dalam mengawal implementasi basis data kepemilikan manfaat dan memastikan adanya kolaborasi yang kuat dengan masyarakat sipil untuk mempercepat terwujudnya basis data kepemilikan manfaat yang bersifat terbuka (<i>open registry</i>) setelah tahap awal implementasi selesai.</p>	<p><i>Catatan: bagian ini akan dievaluasi di akhir siklus rencana aksi.</i></p>
<p><b>10. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik melalui LAPOR!-SP4N</b></p> <p>Pengintegrasian lebih banyak lembaga pemerintah, peningkatan kecepatan tindak lanjut laporan, dan kepatuhan yang lebih baik terhadap standar-standar tata kelola LAPOR!-SP4N.</p>	<p>Pemerintah perlu melibatkan Komisi Informasi dalam pengelolaan laporan masyarakat sebagai bentuk transparansi; juga dibutuhkan adanya pedoman standar bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk merespons laporan masyarakat; serta meningkatkan penggunaan LAPOR!-SP4N oleh publik dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	<p><i>Catatan: bagian ini akan dievaluasi di akhir siklus rencana aksi.</i></p>

## Rekomendasi

Rekomendasi IRM dimaksudkan sebagai pedoman umum untuk penyusunan rencana aksi berikutnya dan juga menjadi masukan untuk pelaksanaan komitmen di rencana aksi saat ini.

Tabel 3. Lima rekomendasi utama IRM

Menguatkan forum multipihak melalui penerbitan keputusan pemerintah yang komprehensif.
Menetapkan mekanisme koordinasi antarlembaga pemerintah yang jelas dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana aksi.

Menunjang partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sipil daerah.
Menyertakan komitmen yang merespons penyempitan ruang sipil serta disinformasi publik dalam rencana aksi berikutnya.
Mendorong penerapan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia di seluruh sektor kebijakan

## Tentang Penulis

**Ravio Patra** adalah seorang peneliti independen di Jakarta, Indonesia yang bekerja di bidang advokasi legislasi dan hak asasi manusia.

**Open Government Partnership (OGP)** bertujuan memperoleh komitmen konkrit dari pemerintah untuk meningkatkan transparansi, menguatkan warga, memerangi korupsi, dan mengembangkan teknologi-teknologi baru yang dapat menunjang pemerintahan. Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) OGP mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi nasional sebagai bagian dari dialog multipihak dan upaya meningkatkan akuntabilitas.



## I. Pendahuluan

Open Government Partnership (OGP) adalah sebuah kemitraan global yang membawa para reformis di pemerintahan serta pemimpin masyarakat sipil untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang dapat membuat pemerintah lebih inklusif, responsif, dan akuntabel. Komitmen-komitmen di dalam rencana aksi OGP dapat berupa suplemen terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada, upaya mengidentifikasi cara-cara baru untuk mengoptimalkan reformasi pemerintahan, atau inisiatif di bidang-bidang yang sama sekali baru. Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) OGP memonitor setiap rencana aksi yang ada untuk memastikan bahwa pemerintah serius melaksanakan dan menyukseskan komitmen-komitmen yang disepakati. Pemimpin masyarakat sipil dan pemerintahan menggunakan hasil evaluasi dari laporan IRM untuk menilai kemajuan yang dicapai di dalam proses membuka pemerintahan serta menentukan apakah komitmen-komitmen tersebut berdampak baik pada kehidupan orang banyak.

Indonesia bergabung dengan OGP pada 2011. Laporan ini mencakup penyusunan dan perancangan rencana aksi kelima Indonesia untuk periode 2018–2020.

Dalam melaksanakan evaluasi ini, IRM bermitra dengan Ravio Patra, seorang peneliti independen. Melalui laporan ini, IRM menyokong dialog yang terus berlangsung terkait penyusunan dan pelaksanaan komitmen-komitmen ke depannya. Untuk penjabaran rinci terkait metodologi penelitian IRM, silakan kunjungi pranala berikut: [opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism](https://opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism).

## II. Konteks Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Menjelang rangkaian pemilihan umum (Pemilu) 2019, Indonesia merampungkan rencana aksi kelima untuk pemerintahan terbuka<sup>1</sup>. DPR juga mengambil langkah besar melalui deklarasi Parlemen Terbuka Indonesia (OPI)—manifestasi dari komitmen yang disampaikan pada OGP Global Summit 2018 di Tbilisi, Georgia. Akan tetapi, rentetan insiden penyerangan terhadap kelompok rentan serta prosekusi terhadap aktivis, jurnalis, dan warga sipil, umumnya menggunakan hukum pencemaran nama, menyita perhatian publik dan mengindikasikan penyempitan ruang sipil di Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara Anggota pendiri OGP bersama Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Inggris, Meksiko, dan Norwegia pada 2011. Tidak lama setelah OGP dideklarasikan, pemerintah Indonesia membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) Open Government Indonesia (OGI) di bawah Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan (UKP4) ketika itu. Pada 2015, setelah pergantian kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo, pemerintah menyerahkan kepengurusan OGI pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga berperan sebagai kementerian yang mengoordinasikan inisiatif OGP di Indonesia.

Pada Desember 2017, pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Asia-Pacific Leaders Forum (APLF) dengan tema Pemerintah Terbuka untuk Pembangunan yang Inklusif.<sup>2</sup> Forum tersebut fokus pada pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dari kawasan Asia-Pasifik terkait keterbukaan pemerintah sebagai pilar pembangunan yang inklusif. Topik-topik yang disorot dalam forum tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rencana aksi ini masih fokus pada tema-tema yang serupa dengan rencana aksi keempat Indonesia, seperti keterbukaan informasi, pengelolaan data, partisipasi publik, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa komitmen baru juga mencakup topik-topik yang tidak ditemukan dalam rencana aksi sebelumnya, yaitu kepemilikan manfaat, kontrak terbuka, akses pada keadilan, dan Pemilu terbuka. Di samping itu, DPR RI juga menyumbangkan lima komitmen parlemen terbuka dalam rencana aksi ini.<sup>3</sup>

Tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>4</sup> menunjukkan bahwa antikorupsi masih merupakan prioritas, meskipun tidak tanpa perlawanan. Salah satu kritik terkuat KPK termasuk Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019, yang konsisten menyuarakan wacana pembubaran KPK<sup>5</sup> karena adanya tumpang tindih antara fungsi penegakan hukum dan penuntutan KPK. Fahri juga merupakan salah satu motor penggerak upaya DPR RI merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).<sup>6</sup> Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan dukungannya terhadap KPK dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2018.<sup>7</sup>

Masih rentannya Indonesia terhadap korupsi terlihat dari beberapa kasus besar terkini yang dibongkar oleh KPK, di antaranya pengusutan kasus Korupsi e-KTP yang melibatkan bekas Ketua DPR RI Setya Novanto dan banyak politisi lain<sup>8</sup> serta penahanan 41 dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malang di Jawa Timur dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada 2015. Di waktu bersamaan, pemerintah mengklaim bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia telah berhasil menekan praktik Korupsi<sup>9</sup> dengan dasar peningkatan skor Indonesia dari 37 pada 2017<sup>10</sup> ke 38 pada 2018<sup>11</sup> dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dari Transparency International.

Pada November 2017, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45/2017 tentang Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah<sup>12</sup>. Berbarengan dengan UU Nomor 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)<sup>13</sup>, UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik<sup>14</sup>, dan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 56/2017<sup>15</sup>, PP ini memperkuat landasan hukum untuk

mendorong peningkatan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, terutama di tingkat pemerintahan daerah.

Banyak upaya peningkatan partisipasi publik yang dijalankan oleh pemerintah menunjukkan kemajuan berkat pelaksanaan komitmen-komitmen data terbuka (*open data*) dan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) melalui rencana aksi OGP. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Indeks Pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik (EGDI), juga mencatat kemajuan Indonesia, seperti terlihat dari peringkat Indonesia yang naik 10 titik ke posisi 107 dalam bidang pemerintahan elektronik serta 22 titik ke posisi 92 dalam bidang partisipasi secara elektronik.<sup>16</sup>

Sejalan tren global, pemerintah Indonesia juga dihadapkan pada prevalensi berita palsu dan bohong<sup>17</sup>, terutama pada masa Pemilu serentak 2019.<sup>18</sup> Dalam banyak kasus, pemerintah kerap melanggar penggunaan UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk memprosekusi warga yang dituduh menyebarkan informasi bohong.

Akan tetapi, UU ITE telah banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Laporan Freedom House pada 2019 dalam *Freedom on the Net*<sup>19</sup> serta *Freedom in the World*<sup>20</sup> menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi, terutama di ranah daring, mengalami penurunan di Indonesia. Kedua laporan tersebut menyoroti maraknya kriminalisasi sipil menggunakan pasal pencemaran nama sebagai akibat dari ketidakjelasan regulasi dalam UU ITE.<sup>21</sup> Dalam konteks yang lebih luas, laporan *Worldwide Governance Indicators*<sup>22</sup> dari Bank Dunia juga menemukan hal serupa: penurunan tingkat kebebasan bersuara serta akuntabilitas dari 2016 ke 2017 di Indonesia. Di samping mengukur tingkat partisipasi publik dalam pemilihan pemerintahan, laporan tersebut juga mengukur persepsi masyarakat terhadap kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat<sup>23</sup>.

Laporan-laporan tersebut konsisten dengan temuan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net). Kelompok advokasi ini mencatat setidaknya 264 kasus pencemaran nama telah dilaporkan untuk menjerat pengguna internet di Indonesia sejak UU ITE disahkan pada 2008.<sup>24</sup> Sebagian besar dari kasus-kasus tersebut—194 (74%)—terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penjelasan pasal pencemaran nama dalam UU ITE yang dinilai ‘karet’<sup>25</sup> ini kerap digunakan untuk menjerat aktivis, peneliti, dan jurnalis; sekalipun kebebasan pers dan kebebasan berekspresi secara jelas dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta UU Nomor 40/1999 tentang Pers<sup>26</sup>. Beberapa kasus yang menyita perhatian termasuk prosekusi terhadap korban yang merekam percakapannya dengan pelaku kekerasan seksual untuk digunakan sebagai bukti di Nusa Tenggara Barat<sup>27</sup>, jurnalis yang melakukan investigasi dugaan korupsi oleh pejabat polisi di Sumatera Utara<sup>28</sup>, dan aktivis Amnesty International Indonesia yang mengkritik pihak militer dalam sebuah unjuk rasa untuk hak asasi manusia di Jakarta<sup>29</sup>.

Di luar ranah daring, SAFE-net juga mencatat setidaknya 64 kasus pelanggaran kebebasan berserikat dan berekspresi antara Januari 2015 dan 2018.<sup>30</sup> Mayoritas insiden tersebut—53 (83%)—berupa intimidasi, persekusi, razia, dan pembubaran kegiatan publik. Kelompok penyintas pembantaian 1965 serta minoritas seksual dan gender seringkali menjadi target Pelanggaran-pelanggaran kebebasan ini. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah ditemui dalam wacana ‘rukiah’ (pengusiran ‘setan’ secara agama) terhadap minoritas LBGT+ yang dicanangkan Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat<sup>31</sup>.

Meskipun banyak bukti menunjukkan penyempitan ruang sipil, terutama bagi kelompok rentan, pers, dan suara-suara yang kritis terhadap pemerintah, tidak ada komitmen yang menyoroti persoalan ini dalam rencana aksi kelima Indonesia. Laporan Global OGP<sup>32</sup> juga menunjukkan bahwa Indonesia belum memanfaatkan proses OGP untuk menyoroti persoalan kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, serta perlindungan bagi jurnalis dan aktivis. Rencana-rencana aksi berikutnya, oleh sebab itu, perlu merespons hal ini agar merefleksikan kebutuhan sipil dan membuat proses OGP relevan dalam merespons persoalan-persoalan di area prioritas.

---

<sup>1</sup> Laporan ini fokus pada konteks perpolitikan yang relevan ketika rencana aksi kelima Indonesia disusun. Hal ini agar laporan memberikan penjelasan akurat terkait prioritas dan dinamika yang memengaruhi baik pihak pemerintah maupun masyarakat sipil ketika menyusun rencana aksi.

- 
- <sup>2</sup> "Asia-Pacific Leaders Forum on Open Government 2017: Open Government for Inclusive Development," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/asia-pacific-leaders-forum-open-government-2017-keterbukaan-pemerintah-untuk-pembangunan-yang-inklusif/>.
- <sup>3</sup> "DPR RI Deklarasikan Open Parliament Indonesia," Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://ogi.bappenas.go.id/news/260/dpr-ri-deklarasikan-open-parliament-indonesia>.
- <sup>4</sup> Alexander Haryanto, "ICW Sebut Masyarakat Puas terhadap Kinerja KPK," Tirto, 2017, <https://tirto.id/icw-sebut-masyarakat-puas-terhadap-kinerja-kpk-ctT8>.
- <sup>5</sup> Ronna Nirmala, "Ihwal Usulan Fahri Soal Pembubaran KPK dan Komnas HAM," Beritagar, 2017, <https://beritagar.id/artikel/berita/ihwal-usulan-fahri-soal-pembubaran-kpk-dan-komnas-ham>.
- <sup>6</sup> Stanley Widiyanto, "Revisi UU KPK Bergulir Kembali, KPK Berpegang Komitmen Jokowi," Tempo, 2017, <https://nasional.tempo.co/read/902687/revisi-uu-kpk-bergulir-kembali-kpk-berpegang-komitmen-jokowi>.
- <sup>7</sup> Kristian Erdianto, "Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi Tegaskan Dukungan terhadap KPK," Tempo, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/11595271/pidato-kenegaraan-presiden-jokowi-tegaskan-dukungan-terhadap-kpk>.
- <sup>8</sup> Krithika Varagur, "Indonesian Corruption Sentence Hailed as Turning Point," Voice of America, 2018, <https://www.voanews.com/a/indonesian-corruption-sentence-hailed-as-turning-point/4367398.html>.
- <sup>9</sup> Eva Mazriea, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Bukti Keseriusan Pemberantasan Korupsi?" Voice of America, 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-bukti-keseriusan-pemberantasan-korupsi-4764712.html>.
- <sup>10</sup> "Corruption Perceptions Index 2017," Transparency International, 2017, <https://www.transparency.org/cpi2017>.
- <sup>11</sup> "Corruption Perceptions Index 2018," Transparency International, 2018, <https://www.transparency.org/cpi2018>.
- <sup>12</sup> "Peraturan Pemerintah Nomor 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah," Pemerintah Indonesia, 2017, <https://www.lhokseumawekota.go.id/aturan/PP%2045%202017.PDF>.
- <sup>13</sup> "Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," Pemerintah Indonesia, 2008, <http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-14-Tahun-2008-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik-1552380453.pdf>.
- <sup>14</sup> "Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik," Pemerintah Indonesia, 2009, <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik.pdf>.
- <sup>15</sup> "Surat Edaran Nomor 56/2017 tentang Pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017, [https://drive.google.com/file/d/1HsVfPbaFZ0B0qu7vuXVrbe0qYhxM34K\\_/view](https://drive.google.com/file/d/1HsVfPbaFZ0B0qu7vuXVrbe0qYhxM34K_/view).
- <sup>16</sup> "United Nations E-Government Knowledgebase," Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2016, <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia/dataYear/2018>.
- <sup>17</sup> Stanley Widiyanto, "Indonesian Police Intensify Crackdown on Fake News," Voice of America, 2018, <https://www.voanews.com/a/indonesian-police-intensify-crackdown-on-fake-news/4667758.html>.
- <sup>18</sup> Nithin Coca, "Will 'Fake News' Determine Indonesia's Next President?" The Diplomat, 2018, <https://thediplomat.com/2018/11/will-fake-news-determine-indonesias-next-president/>.
- <sup>19</sup> "Freedom on the Net 2017: Indonesia," Freedom House, 2017, [https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN%202017\\_Indonesia.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN%202017_Indonesia.pdf).
- <sup>20</sup> "Freedom in the World 2019," Freedom House, 2019, [https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019\\_FH\\_FITW\\_2019\\_Report\\_ForWeb-compressed.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf).
- <sup>21</sup> "Freedom on the Net 2017: Indonesia," Freedom House.
- <sup>22</sup> Daniel Kaufmann & Aart Kraay, "Worldwide Governance Indicators," Bank Dunia, 2017, <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports>.
- <sup>23</sup> Ibid.
- <sup>24</sup> "Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE," Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2019, <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>.
- <sup>25</sup> Vindry Florentin, "Pemerintah Didesak Hapus Pasal Karet UU ITE," Tempo, 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1143103/pemerintah-didesak-hapus-pasal-karet-uu-ite>.
- <sup>26</sup> "Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers," Pemerintah Indonesia, 1999, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999>.
- <sup>27</sup> Beh Lih Yi, "Anger as Indonesia Jails Teacher Who Documented Sexual Harassment," Reuters, 2018, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-women-rights/anger-as-indonesia-jails-teacher-who-documented-sexual-harassment-idUSKCN1NK26J>.
- <sup>28</sup> Jumadi Mappanganro, "Wartawan di Medan dan Sulut Dijerat UU ITE, Ini Sikap Jurnalis dan Aktivist di Makassar," Tribun News, 2018, <http://makassar.tribunnews.com/2018/03/08/wartawan-di-medan-dan-sulut-dijerat-uu-ite-ini-sikap-jurnalis-dan-aktivis-di-makassar>.
- <sup>29</sup> Stanley Widiyanto, "Indonesian Rights Activist Arrest Is Reminder of Authoritarian Past," Voice of America, 2019, <https://www.voanews.com/a/indonesian-rights-activist-arrest-is-reminder-of-authoritarian-past/4817205.html>.
- <sup>30</sup> "Daftar Pelanggaran Hak Berkumpul dan Berekspresi di Indonesia," Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2018, <https://id.safenet.or.id/pelanggaranekspresi/>.
- <sup>31</sup> Gavin Butler, "Pemkot Padang Gelar Program Ruqyah Paksa Demi 'Sembuhkan' Komunitas LGBT," Vice, 2018, [https://www.vice.com/id\\_id/article/3k95x5/pemkot-padang-gelar-program-ruqyah-paksa-demi-sembuhkan-komunitas-lgbt](https://www.vice.com/id_id/article/3k95x5/pemkot-padang-gelar-program-ruqyah-paksa-demi-sembuhkan-komunitas-lgbt).
- <sup>32</sup> "Open Government Partnership Global Report: Democracy Beyond the Ballot Box Volume 2," Open Government Partnership, 2019, [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/Global-Report\\_Volume-2.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/Global-Report_Volume-2.pdf), h. 111.

### III. Kepemimpinan dan Proses Multipihak

Masyarakat sipil mengambil peran sentral dalam menajamkan agenda dan prioritas rencana aksi kelima Indonesia. Forum multipihak (MSF) melakukan pertemuan pada tahap awal penyusunan rencana aksi, akan tetapi keikutsertaan perwakilan pemerintah masih terbatas pada level staf. Tidak jelasnya peran serta mekanisme kerja membuat forum multipihak berperan banyak dalam tahap akhir penyelesaian rencana aksi.

#### 3.1 Kepemimpinan

Bagian ini menjelaskan kepemimpinan serta konteks kelembagaan inisiatif OGP di Indonesia.

Pemerintah Indonesia membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) Open Government Indonesia (OGI) untuk mengoordinasikan kegiatan OGP, termasuk proses penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memimpin koordinasi OGI bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kantor Staf Presiden (KSP).<sup>1</sup>

Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Deputi Kepala Staf Presiden secara resmi memulai proses ko-kreasi rencana aksi kelima Indonesia.<sup>2</sup> Perwakilan dari Sekretariat Masyarakat Sipil Indonesia untuk OGP mencatat bahwa keterlibatan Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sangat membantu masyarakat sipil dalam melewati beberapa hambatan birokratis selama penyusunan rencana aksi.<sup>3</sup> Akan tetapi, pada proses penajaman komitmen setelah pertemuan awal tersebut, partisipasi pejabat pemerintah berbeda-beda terkait tema tiap komitmen.<sup>4</sup> Masalah ini serupa dengan apa yang terjadi pada proses penyusunan rencana aksi OGP Indonesia sebelumnya, meskipun upaya advokasi yang konsisten dari masyarakat sipil membuat proses penyusunan rencana aksi tidak kehilangan momentum.

Partisipasi yang minim dari pejabat pemerintah berakibat pada adanya inkonsistensi dari pihak perwakilan pemerintah dalam proses penajaman serta teknis yang disepakati terkait pelaksanaan komitmen. Hal ini terjadi di antaranya pada komitmen 1 yang pada akhirnya hanya menargetkan pembentukan basis data kepemilikan manfaat tanpa mendorong keterbukaan serta komitmen 9 yang merupakan pengulangan dari kelemahan komitmen serupa dalam rencana aksi keempat Indonesia yang rancangannya mengabaikan proses konsultasi publik yang sudah umum dilaksanakan oleh banyak lembaga pemerintahan di berbagai tingkatan.

Presiden Joko Widodo dikenal dengan sembilan prioritasnya yang dinamai visi '*Nawa Cita*'<sup>5</sup>. Salah satu dari sembilan prioritas ini adalah untuk "membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya"<sup>6</sup>. Visi ini merupakan salah satu pilar utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menjadi landasan pembuatan kebijakan terkait demokrasi, keterwakilan perempuan, transparansi, reformasi birokrasi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan.<sup>7</sup> Sementara itu, meskipun pemerintah tidak mempublikasikan informasi anggaran rinci terkait alokasi anggaran kegiatan OGP, tim Seknas OGI mengonfirmasi bahwa terdapat alokasi anggaran dalam jumlah kecil untuk mendukung staf Seknas OGI di bawah Direktorat Aparatur Negara Bappenas.<sup>8</sup>

Setelah menjadi tuan rumah Asia-Pacific Leaders Forum pada Desember 2017, penyusunan rencana aksi kelima Indonesia tertunda lama akibat mundurnya seluruh staf Seknas OGI dari posisi mereka dengan alasan berbeda-beda. Peralihan kepemimpinan di dalam Bappenas juga turut menunda proses ini, setelah Direktur Aparatur Negara yang telah menjadi koordinator proses OGP sejak 2015 dimutasi ke posisi lain.

Proses penyusunan rencana aksi baru dimulai kembali pada Mei 2018, setelah pemerintah menunjuk seorang konsultan untuk mengawal Seknas OGI dan adanya pertemuan dengan masyarakat sipil.<sup>9</sup> Dalam pertemuan awal tersebut, pemerintah dan masyarakat sipil mengidentifikasi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)<sup>10</sup> untuk 2019 yang dinilai relevan dengan nilai-nilai OGP, termasuk di antaranya data terbuka untuk pemberantasan kemiskinan dan penyediaan layanan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang laik,

penyelenggaraan pelayanan publik, dan akuntabilitas pemerintah.<sup>11</sup> Setelah proses penyusunan, pemerintah merekrut empat staf baru untuk mendukung tugas Seknas OGI.

Rencana aksi kelima Indonesia juga mencakup lima komitmen dari inisiatif Open Parliament Indonesia (OPI). Inisiatif ini merupakan perkembangan positif dalam proses mendorong keterbukaan parlemen di Indonesia, meskipun adanya pemisahan tugas eksekutif dan legislatif<sup>12</sup> membuat proses penyusunan komitmen ini terpisah dari proses multipihak yang dipimpin oleh pemerintah. Secara umum, penyusunan komitmen-komitmen OPI belum menyentuh tingkat partisipasi dan ko-kreasi yang dicapai Seknas OGI.

Organisasi masyarakat sipil Indonesian Parliamentary Center (IPC) memimpin proses penyusunan komitmen OPI bersama Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR tanpa partisipasi dari pihak lain<sup>13</sup>. Komitmen-komitmen tersebut menasar persoalan internal di dalam DPR dan terbatas pada proses konsolidasi internal inisiatif parlemen terbuka dengan penekanan lebih pada bidang akses terhadap informasi. Oleh sebab itu, ruang lingkup serta tingkat ambisi dari komitmen-komitmen ini relatif lebih rendah dari komitmen-komitmen yang disusun oleh pemerintah bersama masyarakat sipil dalam proses multipihak Seknas OGI.

### 3.2 Proses Multipihak dalam Penyusunan Rencana Aksi

Pada 2017, OGP mengadopsi Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi OGP untuk mendukung partisipasi dan ko-kreasi masyarakat sipil di setiap tahapan siklus OGP. Seluruh peserta OGP dituntut untuk memenuhi ketentuan ini. Standar tersebut sendiri bertujuan meningkatkan tingkat ambisi dan kualitas partisipasi multipihak dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan peninjauan rencana aksi OGP.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) OGP juga mengatur perihal persyaratan partisipasi dan ko-kreasi yang harus dipatuhi oleh peserta OGP dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi. Indonesia tidak melanggar ketentuan tersebut dalam proses OGP periode ini.<sup>14</sup>

Mohon simak Lampiran I untuk ringkasan penilaian kepatuhan Indonesia terhadap Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi selama penyusunan rencana aksi ini.

IRM mengadopsi “Spektrum Partisipasi” dari International Association for Public Participation (IAP2) untuk proses OGP.<sup>15</sup> Spektrum ini mengukur potensi tingkat pengaruh publik terhadap kandungan rencana aksi. Sejalan dengan semangat OGP, para peserta dikehendaki untuk setidaknya mencapai tingkat “kolaborasi”.

Tabel 4. Tingkat pengaruh publik

Tingkat Pengaruh Publik		Dalam Penyusunan Rencana Aksi
Berdayakan	Pemerintah menyerahkan wewenang pembuatan keputusan pada masyarakat.	
Kolaborasi	Masyarakat terlibat dalam dialog berulang DAN berperan menetapkan agenda.	✓
Libatkan	Pemerintah memberikan umpan balik terhadap masukan publik.	
Konsultasi	Masyarakat dapat memberi masukan.	
Informasi	Pemerintah menyediakan informasi terkait rencana aksi pada masyarakat.	
Tanpa Konsultasi	Tanpa Konsultasi	

### Forum Multipihak

Sepanjang proses penyusunan rencana aksi, forum multipihak (MSF) bertemu dua kali pada Mei<sup>16</sup> dan Agustus<sup>17</sup> 2018 untuk meluncurkan dan memulai secara resmi proses ko-kreasi. Seknas OGI

mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil, lembaga mitra dan pendana, serta staf lembaga pemerintahan. Akan tetapi, anggota Dewan Pengarah kebanyakan absen dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Forum multipihak tidak tercatat melakukan pertemuan setelah Agustus 2018<sup>18</sup>, termasuk sebelum rencana aksi selesai dan diserahkan pada OGP Support Unit. Dalam dua pertemuan awal tersebut, forum multipihak membahas area-area kunci yang menjadi prioritas komitmen dalam rencana aksi kelima, namun perwakilan pejabat pemerintah tidak terlibat langsung dalam proses penajaman tiap komitmen. Keterlibatan pejabat pemerintah dapat ditemui dalam rupa arahan-arahan umum di awal tiap pertemuan penajaman komitmen dalam bentuk penjabaran keterkaitan rencana aksi OGP dengan RPJMN agar dapat memanfaatkan dukungan dan momentum di tingkat domestik.

Secara keseluruhan, meskipun peran forum multipihak tidak terlihat dalam penajaman masing-masing komitmen, rencana aksi kelima Indonesia memiliki tingkat ambisi yang lebih tinggi dibanding rencana aksi sebelumnya. Hal ini terlihat dari keterlibatan lebih banyak lembaga terkait, adanya komitmen-komitmen di area prioritas seperti antikorupsi dan pengelolaan data, serta ketajaman yang lebih jelas terlihat dalam indikator kesuksesan tiap komitmen. Bukti-bukti yang didapat terkait proses penyusunan rencana aksi mengindikasikan adanya koordinasi dan advokasi langsung antara perwakilan masyarakat sipil dan pejabat pemerintahan, meskipun tidak selalu melalui kanal-kanal resmi, dan berperan penting dalam mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh absensi forum multipihak dalam beberapa tahapan.

Pada Juni 2018, Bappenas menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia.<sup>19</sup> Kepmen ini memberikan secara resmi mengesahkan keanggotaan serta kepemimpinan forum multipihak dalam proses OGP. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bertindak sebagai pimpinan forum multipihak dan didukung oleh sejumlah pejabat lembaga pemerintah lain serta satu orang perwakilan masyarakat sipil dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebagai dewan pimpinan.<sup>20</sup> Kepmen ini juga menunjuk 7 orang perwakilan masyarakat sipil serta 17 perwakilan pemerintah dari berbagai lembaga sebagai anggota forum multipihak. Para perwakilan masyarakat sipil yang terlibat dalam forum multipihak telah terlibat dalam proses ko-kreasi rencana aksi Indonesia di periode sebelumnya.

Pemerintah melibatkan perwakilan masyarakat sipil dalam menyusun mandat forum multipihak<sup>21</sup>. Anggota forum multipihak yang ditunjuk melalui Kepmen tersebut mencakup pejabat-pejabat tinggi dari Sejumlah lembaga pemerintahan serta tokoh masyarakat sipil. Mereka bertindak sebagai penanggung jawab penyusunan, pengawasan, pelaksanaan, dan peninjauan rencana aksi pemerintahan terbuka serta dalam hal koordinasi dan komunikasi antarpihak terkait. Sementara itu, Dewan Pengarah bertanggung jawab untuk menyusun strategi pemerintahan terbuka serta menyokong proses implementasi rencana aksi dengan menyelesaikan hambatan-hambatan yang ditemui. Pada awal tahapan penyusunan rencana aksi, forum multipihak bertemu dalam proses diskusi awal yang diinisiasi pemerintah untuk membahas area prioritas rencana aksi dan kemudian diikuti oleh rangkaian pertemuan kecil antarpihak terkait yang bertanggung jawab atas dan mendukung pelaksanaan masing-masing komitmen.

Akan tetapi, Keputusan Menteri Bappenas tersebut tidak menetapkan mekanisme yang jelas bagi forum multipihak untuk melaksanakan mandat-mandat strategis yang diberikan. Pengamatan Peneliti IRM mengindikasikan adanya perbedaan persepsi di antara berbagai pihak yang terlibat terkait frekuensi pertemuan, wewenang, dan alokasi anggaran bagi forum multipihak. Meskipun perwakilan pemerintah<sup>22</sup> dan masyarakat sipil<sup>23</sup> sama-sama menyatakan harapan agar forum multipihak berperan aktif dalam memimpin proses OGP, Bappenas selaku koordinator tidak menyelenggarakan pertemuan forum multipihak setelah tahap awal penyusunan rencana aksi.

### **Kemitraan dan Partisipasi dalam Penyusunan Rencana Aksi**

Pada Mei 2018, pemerintah menyelenggarakan lokakarya bersama masyarakat sipil untuk membahas tahapan proses penyusunan rencana aksi. Pemerintah menyampaikan masukan terkait tema, arah kebijakan, serta prioritas<sup>24</sup> yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019

sebagai rujukan. Seknas OGI juga membagikan perangkat ko-kreasi<sup>25</sup> yang disusun untuk memudahkan koordinasi dan partisipasi pemerintah dan masyarakat sipil.

Cakupan perangkat ko-kreasi tersebut termasuk kerangka waktu rinci untuk proses penyusunan rencana aksi, prosedur penyusunan komitmen, usulan pembentukan kelompok kerja tematik, dan metode partisipasi yang dapat diterapkan, yaitu diskusi formal, lokakarya, telekonferensi, seminar konsultasi publik, dan konsultasi publik secara daring.<sup>26</sup>

Kelompok masyarakat sipil mengambil peran aktif dalam menentukan arah agenda penyusunan rencana aksi periode ini. Sepanjang kekosongan staf Seknas OGI, Sejumlah organisasi masyarakat sipil berinisiatif memulai proses diskusi bulanan membahas agenda penyusunan rencana aksi bersama beberapa unsur masyarakat sipil lain yang telah terlibat dalam proses OGP di periode sebelumnya dan menghasilkan tema-tema prioritas yang kemudian diusulkan untuk diadopsi dalam rencana aksi kelima Indonesia.<sup>27</sup> Pada saat peluncuran proses penyusunan rencana aksi, kelompok masyarakat sipil menyampaikan usulan tersebut pada seluruh pihak yang terlibat<sup>28</sup>.

Kerangka usulan masyarakat sipil tersebut diterima oleh forum multipihak sebagai basis pembentukan kelompok-kelompok kerja yang bertugas membahas komitmen-komitmen untuk rencana aksi Indonesia. Tiap kelompok kerja ditugaskan menyusun komitmen masing-masing untuk kemudian diusulkan kepada forum multipihak. Tema-tema tersebut yaitu penyelenggaraan pelayanan publik, data terbuka, akuntabilitas publik, pemberantasan kemiskinan, kepemilikan manfaat, dan pemerintahan daerah.<sup>29</sup>

Setelah pertemuan awal pada Agustus 2018, proses penyusunan rencana aksi dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan tematik. Perwakilan dari pemerintah dan masyarakat sipil bertemu dengan kelompok kerja yang dibentuk untuk menyusun komitmen sesuai tema masing-masing. Beberapa pihak yang belum pernah terlibat dalam proses OGP sebelumnya, seperti Yayasan Tifa, Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), USAID, dan National Democratic Institute (NDI) juga berpartisipasi dalam proses ini.

Pada akhir proses ko-kreasi, seluruh komitmen yang diusulkan oleh perwakilan masyarakat sipil di pertemuan awal disepakati untuk diadopsi ke dalam rencana aksi Indonesia dengan beberapa penyesuaian indikator kesuksesan yang disepakati bersama perwakilan pemerintah. Sementara itu, komitmen untuk melanjutkan proses penyusunan Peta Jalan dan Rencana Strategis OGI yang juga diusulkan disepakati kurang relevan<sup>30</sup> dengan nilai-nilai OGP dan minimnya unsur keterlibatan masyarakat di dalamnya. Oleh sebab itu, proses tersebut tidak diikuti sebagai komitmen rencana aksi OGP namun tetap dilanjutkan sebagai rencana kerja internal melalui konsultasi Bappenas dan masyarakat sipil.

Selama proses konsultasi, kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah yang terlibat seringkali mengirimkan perwakilan dari tingkat staf biro perencanaan masing-masing, sesuai dengan mekanisme koordinasi yang berlaku di Bappenas. Menurut keterangan Seknas OGI, praktik ini dinilai sebagai pendekatan terbaik menimbang biro perencanaan terkait langsung dengan Bappenas selaku koordinator proses OGP di Indonesia. Akan tetapi, minimnya partisipasi pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan dikritik oleh perwakilan masyarakat sipil. Dalam proses konsultasi, beberapa K/L juga mengirimkan perwakilan yang berbeda-beda antara satu pertemuan dan pertemuan lainnya.<sup>31</sup> Meskipun hal ini mestinya tidak menjadi masalah, kurangnya koordinasi<sup>32</sup> di antara tiap perwakilan yang datang dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya menghasilkan sejumlah inkonsistensi dalam pendekatan pemerintah terhadap masing-masing komitmen.

Setelah proses konsultasi berakhir, pemerintah mempublikasikan rancangan rencana aksi untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat secara daring<sup>33</sup>. Sebanyak 17 tanggapan publik<sup>34</sup> diterima, terutama untuk komitmen terkait keterbukaan anggaran, legislasi elektronik di tingkat daerah, dan forum konsultasi publik. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap masukan publik tersebut di laman OGI dengan fokus pada unsur-unsur utama<sup>35</sup> yang memengaruhi rencana aksi serta bagaimana tiap masukan disampaikan pada kelompok kerja yang membahas komitmen terkait, sebagaimana dilaporkan di repositori daring OGI<sup>36</sup>. Perwakilan dari organisasi masyarakat sipil MediaLink, yang berperan mengoordinasikan partisipasi masyarakat sipil dalam

proses OGP di Indonesia, menambahkan bahwa meskipun indikator kesuksesan tiap komitmen banyak dipengaruhi oleh arahan RKP, hasil akhir rencana aksi kelima Indonesia mengandung seluruh prioritas tematik yang dirancang oleh masyarakat sipil<sup>37</sup>. Di samping itu, upaya masyarakat sipil untuk melibatkan kelompok-kelompok yang belum terlibat aktif dalam proses OGP sukses menghasilkan komitmen penguatan akses terhadap keadilan yang digawangi oleh YLBHI dan Yayasan Tifa.

Secara keseluruhan, 14 komitmen dari pemerintah yang termasuk di dalam rencana aksi kelima Indonesia selaras dengan tema-tema prioritas yang diusulkan oleh perwakilan masyarakat sipil.<sup>38</sup> Akan tetapi, setelah tahap konsultasi awal, forum multipihak tidak mengadakan pertemuan untuk memberikan umpan balik terhadap rancangan rencana aksi. Pada Desember 2018, pemerintah menyampaikan rencana aksi kepada OGP Support Unit tanpa melalui proses peninjauan akhir oleh forum multipihak.<sup>39</sup> Beberapa komitmen di dalam rencana aksi ini juga melanjutkan upaya membuka proses pemerintahan di tingkat subnasional. Meskipun begitu, keseluruhan proses penyusunan rencana aksi diadakan di ibukota Jakarta tanpa adanya fasilitasi keikutsertaan baik pemerintah maupun masyarakat sipil dari daerah luar Jakarta. Terlepas dari adanya kesempatan untuk memberikan komentar dan/atau umpan balik melalui proses konsultasi daring, penting dicatat bahwa pemerintah hendaknya mengambil langkah-langkah proaktif untuk melibatkan pihak-pihak terkait dari luar wilayah ibukota, terutama menimbang adanya sejumlah komitmen yang secara khusus menasar keterbukaan pemerintah di tingkat subnasional.

Di samping itu, pemerintah juga menyepakati komitmen internal yang bukan merupakan bagian dari rencana aksi OGP untuk mendorong proses pemerintahan di tingkat subnasional melalui sejumlah inisiatif kota pintar.<sup>40</sup> Kesepakatan ini membuat rencana aksi kelima Indonesia memiliki fokus yang lebih baik pada prioritas tematik di bawah koordinasi pemerintah pusat sembari tetap melanjutkan proses membuka pemerintahan di tingkat subnasional. Untuk komitmen ini, Seknas OGI berkolaborasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta organisasi masyarakat sipil Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), MediaLink, Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Ketika diserahkan pada OGP Support Unit, rencana aksi Indonesia juga memuat lima komitmen dari agenda parlemen terbuka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan ko-kreasi komitmen-komitmen tersebut dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC) sebagai tindak lanjut terhadap deklarasi Open Parliament Indonesia (OPI) pada Agustus 2018.<sup>41</sup> IPC berperan penting dalam menajamkan agenda komitmen-komitmen parlemen terbuka yang dihasilkan dengan fokus utama pada peningkatan akses terhadap informasi kinerja parlemen serta pengembangan kerangka kelembagaan OPI. Mengingat komitmen-komitmen parlemen terbuka disusun melalui proses yang terpisah dari pemerintah, penilaian terhadap keterlibatan forum multipihak tidak mencakup komitmen-komitmen parlemen terbuka yang hanya melibatkan DPR dan IPC saja.

### **Rekomendasi untuk Partisipasi dan Ko-Kreasi dalam Penyusunan Renaksi**

Indonesia menunjukkan bukti-bukti yang mengindikasikan pencapaian dan keberhasilan dalam menyusun mandat dan komposisi forum multipihak. Kepmen Bappenas tentang Tim Strategis OGI menunjuk sekelompok tokoh pemerintahan dan masyarakat sipil dari sektor-sektor beragam untuk menjalankan mandat-mandat yang ditentukan.

Berikut adalah sejumlah area yang masih perlu dioptimalkan oleh Indonesia:

- Prosedur serta pelaksanaan forum multipihak, termasuk namun tidak terbatas pada kejelasan frekuensi pertemuan forum serta tuntutan bagi forum untuk berperan aktif secara konsisten dalam penyusunan rencana aksi.
- Komunikasi dan jangkauan mitra dalam proses penyusunan rencana aksi, termasuk namun tidak terbatas pada konsistensi dalam mempublikasikan informasi dan dokumen terkait di repositori daring OGI sebelum rencana aksi disahkan serta membuka proses penyusunan bagi seluruh pihak yang ingin turut serta.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Indonesia di area-area tersebut, peneliti IRM menyarankan untuk:

- Mengukur dampak pelaksanaan rencana aksi OGP di periode sebelumnya untuk menentukan area-area prioritas yang akan menjadi fokus rencana aksi berikutnya serta pendekatan-pendekatan terbaik yang efektif pada tahap pelaksanaan komitmen melalui sebuah studi awalan yang komprehensif.
- Menyusun strategi untuk menyebarluaskan informasi terkait proses konsultasi publik kepada masyarakat sebelum rencana aksi disahkan.
- Menetapkan mekanisme dan prosedur yang jelas bagi pelaksanaan forum multipihak melalui dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil.
- Mendorong partisipasi pejabat pemerintah di tingkat pengambil keputusan untuk memperkuat strategi serta konsistensi pelaksanaan rencana aksi.
- Memfasilitasi partisipasi pemerintah dan masyarakat sipil di tingkat daerah dengan mengoptimalkan kanal-kanal konsultasi di luar Jakarta dan/atau membuka peluang partisipasi jarak jauh.

---

<sup>1</sup> “Peran Sekretariat Nasional OGI,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, diakses pada Maret 2019, <https://ogi.bappenas.go.id/about/2/sekretariat-nasional-ogi>.

<sup>2</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 4 Maret 2019.

<sup>3</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.

<sup>4</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 4 Maret 2019.

<sup>5</sup> “Visi, Misi, Program Aksi Joko Widodo-Jusuf Kalla,” Komisi Pemilihan Umum, 2014, [https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi\\_Misi\\_JOKOWI-JK.pdf](https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf).

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> “Converging Development Agendas: ‘Nawa Cita’, ‘RPJMN’, and ‘SDGs,’” UNDP Indonesia, 2015, <http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2015/doc/publication/ConvFinal-En.pdf>.

<sup>8</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 4 Maret 2019.

<sup>9</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Februari 2019.

<sup>10</sup> “Peraturan Presiden Nomor 72/2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018,” Pemerintah Indonesia, <https://www.bappenas.go.id/files/rkp/PERPRES%20NO.%2072%20RKP%20TAHUN%202019.pdf>.

<sup>11</sup> “Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Arah Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/KWHf5trDZmKfvMG#pdfviewer>.

<sup>12</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Bertindak melanggar ketentuan proses OGP – pemerintah tidak memenuhi (1) “Libatkan” pada proses penyusunan atau “Informasikan” pada proses pelaksanaan rencana aksi (2) pemerintah gagal mengumpulkan, mempublikasikan, dan mendokumentasikan repositori daring di laman nasional OGP sesuai panduan IRM.

<sup>15</sup> IAP2 International Federation, “IAP2 Spectrum of Public Participation,” 2018, [https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum\\_8.5x11\\_Print.pdf](https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf).

<sup>16</sup> “Catatan Workshop,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/KWHf5trDZmKfvMG#pdfviewer>.

<sup>17</sup> “Notulensi Kegiatan Kick-Off Pembahasan Rancangan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018–2020,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/wvOZD79dOglmqG2#pdfviewer>.

<sup>18</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 4 Maret 2019.

<sup>19</sup> “Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, <http://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/515>.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.

<sup>22</sup> Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 4 Maret 2019.

<sup>23</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.

<sup>24</sup> “Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Arah Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019,” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

- 
- <sup>25</sup> “Toolkit Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/KWHf5trDZmKfvMG#pdfviewer>.
- <sup>26</sup> Ibid.
- <sup>27</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.
- <sup>28</sup> “Rumusan Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia – CSO 2018–2020,” Sekretariat CSO untuk Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/KWHf5trDZmKfvMG#pdfviewer>.
- <sup>29</sup> “Catatan Workshop,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia.
- <sup>30</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.
- <sup>31</sup> Ibid.
- <sup>32</sup> Ibid.
- <sup>33</sup> “Bagi Aspirasimu untuk Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018–2020,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1BbR\\_gN-84rH4yCm4R7EdyBPE\\_LOOV\\_i08wkTCOfjSJOpnA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1BbR_gN-84rH4yCm4R7EdyBPE_LOOV_i08wkTCOfjSJOpnA/viewform).
- <sup>34</sup> “Tahapan Penyusunan Renaksi 2018–2020: Konsultasi Publik Secara Online,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://ogi.bappenas.go.id/renaksi/5/2018-2020>.
- <sup>35</sup> Ibid.
- <sup>36</sup> Ibid.
- <sup>37</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.
- <sup>38</sup> Hendrik Rosdinar (YAPPIKA-ActionAid), wawancara oleh peneliti IRM, 9 Maret 2019.
- <sup>39</sup> Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 7 Maret 2019.
- <sup>40</sup> “Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018–2020,” Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/GQUMgWpFeeGBpT#pdfviewer>, h. 51.
- <sup>41</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

## IV. Komitmen

Seluruh pemerintah peserta OGP menyusun rencana aksi OGP yang mencakup komitmen-komitmen nyata dalam periode dua tahunan. Pemerintah memulai proses penyusunan rencana aksinya dengan menyampaikan berbagai upaya terkini terkait pemerintahan terbuka, termasuk strategi-strategi spesifik serta program-program yang sedang dijalankan.

Komitmen haruslah sesuai dengan situasi dan tantangan yang unik bagi tiap peserta. Komitmen OGP juga harus memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai OGP yang dijelaskan dalam AD/ART dan ditandatangani oleh seluruh peserta OGP.<sup>1</sup> Indikator-indikator serta metode yang digunakan dalam penelitian IRM dapat dipelajari dalam dokumen Petunjuk Prosedur IRM.<sup>2</sup> Berikut adalah ringkasan indikator-indikator utama yang ditinjau oleh IRM:

- **Ketajaman:**
  - Tidak cukup tajam untuk diverifikasi: Sebagaimana ditulis dalam teks komitmen, apakah tujuan yang dinyatakan serta tindakan yang diajukan tidak cukup jelas dan tajam untuk dapat diverifikasi secara objektif melalui proses peninjauan?
  - Cukup tajam untuk diverifikasi: Sebagaimana ditulis dalam teks komitmen, apakah tujuan yang dinyatakan serta tindakan yang diajukan cukup jelas dan tajam untuk dapat diverifikasi melalui proses peninjauan?
- **Keterkaitan:** Variabel ini mengevaluasi keterkaitan suatu komitmen dengan nilai-nilai OGP. Berdasarkan pembacaan teliti terhadap teks komitmen sebagaimana tercantum dalam rencana aksi, pertanyaan panduan untuk menentukan keterkaitan adalah:
  - Akses terhadap Informasi: Akankah pemerintah membuka lebih banyak informasi atau meningkatkan kualitas dari informasi yang dibuka kepada publik?
  - Partisipasi Publik: Akankah pemerintah menciptakan atau meningkatkan kesempatan atau kemampuan masyarakat untuk memperkaya atau memengaruhi keputusan atau kebijakan?
  - Akuntabilitas Publik: Akankah pemerintah menciptakan atau meningkatkan peluang publik untuk menuntut akuntabilitas pejabat publik atas tindakannya?
  - Teknologi & Inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas: Akankah Inovasi teknologi digunakan bersamaan dengan setidaknya salah satu dari tiga nilai OGP lainnya dalam meningkatkan transparansi atau akuntabilitas?
- **Potensi Dampak:** Variabel ini meninjau potensi dampak dari sebuah komitmen, jika dilaksanakan sesuai dengan rincian teks tertulis. Peneliti IRM menggunakan teks komitmen asli dari rencana aksi untuk:
  - Mengidentifikasi masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan;
  - Memaparkan status quo yang berlaku ketika rencana aksi disusun; dan
  - Meninjau sejauh mana sebuah komitmen, jika dilaksanakan, akan berdampak terhadap kinerja pemerintah dan menyelesaikan masalah.
- **Penyelesaian:** Variabel ini meninjau pelaksanaan dan kemajuan komitmen. Variabel ini ditinjau hanya pada akhir siklus rencana aksi, di dalam Laporan Pelaksanaan IRM.
- **Apakah Membuka Pemerintah?** Variabel ini bermaksud mengukur manfaat komitmen terhadap keterbukaan pemerintah melampaui keluaran dan hasil yang ada dengan melihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, di area-area yang terkait dengan nilai-nilai OGP, Berubah berkat hasil dari pelaksanaan komitmen. Variabel ini hanya ditinjau pada akhir siklus rencana aksi, di dalam Laporan Pelaksanaan IRM.

### Apa Kriteria Komitmen Bintang?

Sebuah komitmen bintang memiliki potensi lebih baik untuk mencapai ambisi tinggi dan untuk dilaksanakan. Sebuah komitmen yang baik menjelaskan dengan baik hal-hal berikut:

1. **Masalah:** Apa masalah ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan yang disorot? Bukan masalah yang bersifat administratif atau kebutuhan alat pendukung. Contoh: ‘ketidaktepatan alokasi anggaran kesejahteraan’ lebih berdampak daripada ‘belum memiliki laman resmi’.
2. **Status Quo:** Apa status quo subjek kebijakan yang disasar di awal rencana aksi? Contoh: “26 persen pengaduan penyelewengan di bidang hukum tidak ditindaklanjuti”.
3. **Perubahan:** Dibandingkan keluaran internal, apa perubahan perilaku yang ingin didorong melalui pelaksanaan komitmen? Contoh: “Menggandakan tingkat tanggapan terhadap permohonan informasi publik” adalah keluaran yang lebih berdampak daripada “mempublikasikan protokol tanggapan terhadap permohonan informasi publik”.

### Komitmen Bintang

“Komitmen bintang” (★) perlu dijelaskan lebih lanjut mengingat adanya ketertarikan khusus terhadap komitmen bintang serta fungsinya dalam mendorong peserta-peserta OGP berlomba menjadi yang terbaik. Komitmen bintang secara umum dipahami sebagai komitmen percontohan OGP. Untuk memperoleh bintang, sebuah komitmen harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- Potensi bintang: rancangan komitmen memiliki **ketajaman, keterkaitan** terhadap nilai-nilai OGP, dan potensi dampak yang **transformatif**.
- Pemerintah harus menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan komitmen, setidaknya dinilai **substansial** atau **tuntas** dalam hal penyelesaian.

Variabel ini ditinjau di akhir siklus rencana aksi, dalam *Laporan Pelaksanaan IRM*.

### Ringkasan Umum Komitmen

Rencana aksi kelima Indonesia mencakup 14 (empat belas) komitmen dari pihak pemerintah dan 5 (lima) komitmen dari pihak parlemen. Tema-tema seperti peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas, pembukaan akses partisipasi publik, penguatan akses terhadap informasi dan kualitas pengelolaan data, serta perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik masih mendominasi rencana aksi sebagai fokus utama. Perlu juga dicatat bahwa rencana aksi kelima ini memperkenalkan komitmen pertama Indonesia di prioritas tematik transparansi kepemilikan manfaat.

---

<sup>1</sup> “Open Government Partnership: Articles of Governance,” Open Government Partnership, 2012 (diperbarui Maret 2014, April 2015, dan Juni 2019), [https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/OGP\\_Articles-of-Governance\\_2019.pdf](https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/OGP_Articles-of-Governance_2019.pdf).

<sup>2</sup> “IRM Procedures Manual,” Open Government Partnership, 2017, <https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual>.

# Komitmen Parlemen Terbuka Indonesia

## I. Peningkatan Manajemen Data dan Layanan Informasi Legislatif

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

- Meningkatkan jumlah serta kecepatan publikasi data dan informasi terkait proses legislatif yang sedang berlangsung.
- Mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses legislatif.

### Tahapan Komitmen:

1. Perumusan Pedoman dan Laporan Penilaian.
2. Advokasi perekrutan anggota staf fungsional.
3. Peningkatan kapasitas Sekretaris Jenderal dalam pengelolaan data dan informasi.
4. Pemantauan dan evaluasi berkala atas publikasi sistem informasi legislatif.
5. *Serial workshop*, pengujian publik, pemantauan, dan evaluasi publikasi sistem informasi legislatif.
6. Pengembangan aplikasi Sileg.
7. *Serial focus group discussion, workshop, monitoring*, dan evaluasi.

**Awal Pelaksanaan:** September 2018

**Akhir Pelaksanaan:** Agustus 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
I. Peningkatan Manajemen dan Layanan Informasi Legislatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.				

### Konteks dan Tujuan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan parlemen yang berfungsi dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintah di Indonesia. Sebagai pengemban fungsi legislasi, DPR menyerap aspirasi publik dalam menyusun rancangan perundang-undangan agar sesuai dengan kepentingan dan desakan publik. Akan tetapi, kondisi geografis Indonesia sebagai kepulauan yang luas membuat pengumpulan aspirasi publik secara langsung dari konstituen di berbagai daerah menjadi tantangan tersendiri bagi para anggota DPR.

Didukung oleh kemajuan teknologi, keterhubungan konstituen dengan anggota DPR menjadi semakin mudah. Pada prinsipnya, masyarakat dapat mengakses informasi publik melalui laman DPR di [dpr.go.id](http://dpr.go.id) dan menggunakan informasi tersebut dalam mengawasi kinerja legislasi DPR. Akan tetapi, pada praktiknya informasi yang tersedia di laman tersebut masih sangat terbatas dan seringkali terlambat dipublikasikan.<sup>1</sup> Sebagai contoh, DPR bisa jadi telah menyelesaikan proses penyusunan rancangan undang-undang ketika informasi terkait proses tersebut baru

dipublikasikan, sehingga masyarakat kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Di status quo, kebijakan keterbukaan informasi di DPR juga tidak mengatur keterbukaan informasi legislasi sejalan dengan proses legislasi secara spesifik.

Membuka akses publik terhadap informasi publik merupakan amanat dari UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<sup>2</sup>. UU tersebut secara jelas menggariskan pentingnya membuka informasi kepada publik untuk menunjang partisipasi masyarakat luas dalam proses pembuatan kebijakan. Di dalam DPR pun, terdapat peraturan terkait berupa Peraturan DPR Nomor 1/2010 tentang Keterbukaan Informasi<sup>3</sup>.

Peraturan DPR tersebut mengatur seluruh informasi terkait struktur organisasi, program kerja, kegiatan dan kinerja, serta laporan audit anggaran DPR merupakan informasi publik<sup>4</sup> yang sifatnya wajib dibuka kepada publik. Pengecualian<sup>5</sup> hanya diberikan pada informasi yang bersifat sensitif dan (i) dapat membahayakan keamanan nasional, (ii) bersifat privat, (iii) bersifat rahasia, dan (iv) merupakan informasi yang tidak didokumentasikan. Akan tetapi, pada praktiknya DPR belum berhasil mematuhi peraturan tersebut dengan mempublikasikan informasi terbaru di lamannya. Oleh sebab itu, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terkait proses legislasi di DPR.

Meskipun terdapat UU dan juga Peraturan DPR yang mengamanatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, DPR tidak memiliki mekanisme yang jelas mengatur kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Sebagai contoh, akses terhadap informasi legislasi yang rendah berakibat pada keterbatasan partisipasi masyarakat hanya melalui kanal-kanal konvensional, seperti partisipasi secara langsung dan korespondensi melalui surat.<sup>6</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DPR telah mengembangkan Sistem Informasi Legislasi (Sileg). Sileg dimaksudkan sebagai penunjang akses publik terhadap informasi legislasi terbaru dan komprehensif. Akan tetapi, di status quo, DPR tidak memelihara Sileg dengan baik<sup>7</sup> sehingga tidak digunakan oleh masyarakat. Perwakilan masyarakat sipil dari Indonesian Parliamentary Center (IPC)<sup>8</sup> yang ikut menyusun komitmen ini juga menegaskan ketiadaan mekanisme keterbukaan informasi publik yang jelas di lingkungan DPR sebagai masalah utama.

Melalui komitmen ini, DPR bermaksud merancang ulang aplikasi Sileg agar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses parlemen yang terbuka. Di status quo, praktik di DPR adalah untuk mempublikasikan informasi legislasi setelah proses legislasi tersebut selesai. Akibatnya, partisipasi publik menjadi tidak efektif dan sulit untuk memengaruhi proses legislasi, serupa dengan masalah yang ditemukan pada laman DPR. Oleh sebab itu, perancangan ulang aplikasi Sileg ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan informasi legislatif yang baik dimulai dari proses perencanaan. Dengan begitu, masyarakat dapat, misalnya, mengakses suatu rancangan perundang-undangan dan membentuk opininya sendiri. Lebih lanjut, aplikasi Sileg juga akan menambahkan fitur bagi masyarakat untuk menyampaikan komentarnya terhadap proses legislasi yang ada.

Di samping itu, komitmen ini juga bermaksud membangun kapasitas staf sekretariat DPR dalam mengelola data dan informasi. Sekretariat DPR akan melaksanakan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap seluruh petugas terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada di seluruh satuan kerja DPR.

### **Langkah Selanjutnya**

Komitmen ini menghadirkan tantangan yang sama beratnya bagi DPR dan masyarakat. Di satu sisi, DPR diwajibkan untuk meningkatkan kepatuhannya dalam hal keterbukaan informasi publik. Di sisi lain, masyarakat ingin berpartisipasi dalam proses legislasi namun terhambat oleh keterbatasan akses terhadap informasi serta ketidaktersediaan kanal penyampaian aspirasi.

Dalam menunjang pelaksanaan komitmen ini, DPR dapat fokus pada aspek-aspek berikut:

- Mengembangkan mekanisme keterbukaan informasi yang jelas bagi seluruh satuan kerja di DPR. Mekanisme ini perlu mencakup hal-hal seperti prosedur standar dalam hal produksi, pengembangan, dan publikasi informasi legislasi melalui laman DPR dan aplikasi

Sileg. Sebagai contoh, mekanisme ini perlu merinci cara publikasi informasi legislasi oleh DPR, format berkas-berkas yang dipublikasikan, rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan legislasi dan publikasi informasi terkait, dan penyertaan narasi yang jelas tentang rancangan perundang-undangan yang sedang disusun.

- Berbarengan dengan penambahan fitur komentar publik/survei/penyampaian aspirasi ke aplikasi Sileg, DPR juga dapat menyusun prosedur yang jelas untuk mewajibkan anggota DPR menanggapi masukan publik yang diterima. Lebih lanjut, juga penting bagi aplikasi Sileg untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permohonan umpan balik terhadap aspirasi yang telah disampaikan serta penjelasan terkait bagaimana masukan mereka digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun produk legislasi.

Di samping itu, DPR juga dapat mempelajari peluang untuk meningkatkan ataupun mengintegrasikan beberapa portal yang ada di status quo untuk menunjang partisipasi masyarakat yang lebih baik:

- Portal penyampaian dan pelacakan pengaduan publik [pengaduan.dpr.go.id](http://pengaduan.dpr.go.id).
- Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) [ppid.dpr.go.id](http://ppid.dpr.go.id).
- Portal DPR di sistem pengadaan barang/jasa publik secara elektronik [ipse.dpr.go.id](http://ipse.dpr.go.id).

---

<sup>1</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>2</sup> "Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," Pemerintah Indonesia, 2008, <http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-14-Tahun-2008-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik-1552380453.pdf>.

<sup>3</sup> "Peraturan DPR Nomor 1/2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI," Dewan Perwakilan Rakyat, 2010, <http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-Peraturan-DPR-RI-No.-1-Tahun-2010-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik-di-DPR-RI-1552380559.pdf>.

<sup>4</sup> Ibid., h. 3.

<sup>5</sup> Ibid., h. 4.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>8</sup> Ibid.

## 2. Promosi Pemanfaatan Teknologi Informasi Parlemen

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

- Meningkatkan integrasi data dan informasi berbasis web.
- Mengembangkan aplikasi untuk meningkatkan pelayanan informasi dan partisipasi publik terkait proses legislatif.
- Meningkatkan mekanisme penyelenggaraan pelayanan informasi dan partisipasi publik melalui aplikasi yang dikembangkan.
- Mengembangkan aplikasi daring khusus untuk informasi dan partisipasi publik terkait kinerja parlemen.

### Tahapan Komitmen:

1. Penilaian penelitian.
2. Desain *website*.
3. Peluncuran/peresmian aplikasi secara publik.

**Awal Pelaksanaan:** September 2018

**Akhir Pelaksanaan:** Agustus 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
2. Promosi Pemanfaatan Teknologi Informasi Parlemen	✓	✓	✓			✓		✓					Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.	Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.					

### Konteks dan Tujuan

Terdapat banyak satuan kerja dengan fungsi berbeda-beda di dalam DPR. Dalam melaksanakan setiap fungsinya, tiap satuan kerja tersebut diamanatkan untuk menyediakan informasi publik oleh UU tentang Keterbukaan Informasi Publik<sup>1</sup> dan Peraturan DPR tentang Keterbukaan Informasi<sup>2</sup>. Sejalan dengan perkembangan teknologi, DPR juga mulai mengadopsi wadah-wadah teknologi informasi dalam menunjang keterbukaan informasi publik melalui pengembangan portal-portal dan juga aplikasi-aplikasi pendukung akses publik terhadap informasi parlemen.

Di status quo, laman DPR [dpr.go.id](http://dpr.go.id) terdiri atas sejumlah menu seperti berita, agenda kegiatan, rencana legislasi, Dokumentasi kegiatan, profil anggota, arsip, dan penambahan menu Parlemen Terbuka. Akan tetapi, jenis dan format informasi yang dipublikasikan di laman tersebut tidak mengikuti standar yang seragam. Menurut Indonesian Parliamentary Center (IPC)<sup>3</sup> yang ikut merancang komitmen ini bersama DPR, inkonsistensi standar jenis dan format informasi ini merupakan hambatan besar bagi masyarakat dalam mengakses informasi parlemen.

Secara keseluruhan, laman dan portal DPR mengindikasikan adanya komitmen nyata untuk membuka akses publik terhadap informasi serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses parlemen. Akan tetapi, seperti dicakup dalam rencana aksi, tujuan utama komitmen ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang menjadi hambatan

masyarakat dalam mengakses informasi dan berpartisipasi. Oleh sebab itu, temuan dalam proses ini akan digunakan dalam mendukung rencana DPR merancang dan mengatur ulang seluruh laman dan portal, meskipun belum ada rencana yang rinci untuk menysasar perihal partisipasi publik secara daring<sup>4</sup>.

Komitmen ini memiliki potensi dampak kecil untuk mengubah proses parlemen. Meskipun DPR memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas laman dan portal informasi yang dimiliki, belum ada rencana yang jelas terkait peningkatan penggunaan laman dan portal informasi tersebut oleh masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, upaya untuk memperbaiki mekanisme keterbukaan informasi di DPR tetap memiliki potensi mengurangi disinformasi terkait proses parlemen.

### Langkah Selanjutnya

Pelaksanaan komitmen ini sangat bergantung pada proses internal di dalam parlemen. Untuk merancang ulang laman DPR agar memberikan kemudahan akses bagi pengguna, DPR perlu menetapkan mekanisme koordinasi antarpengelola informasi di tiap satuan kerja. Hal ini dapat meminimalisasi publikasi yang redundan di topik-topik serupa dari satuan kerja berbeda.

Dalam melaksanakan asesmen terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses parlemen, DPR perlu melibatkan organisasi masyarakat sipil dan/atau organisasi riset dengan kepakaran dalam proses parlemen. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), misalnya, merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang sudah berpengalaman dalam meneliti partisipasi publik dalam proses parlemen.<sup>5</sup>

Meskipun peningkatan akses informasi publik adalah hal yang penting, terdapat beberapa unsur lain yang perlu dikawal DPR dalam menjamin peningkatan partisipasi publik yang bermakna dan berdampak. Beberapa langkah yang dapat diambil:

- Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan aplikasi partisipasi publik daring melalui kolaborasi dalam melakukan asesmen terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses parlemen.
- Memperluas Cakupan upaya-upaya mempromosikan penggunaan wadah-wadah teknologi informasi di DPR untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
- Mengembangkan mekanisme yang jelas untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelola informasi di tiap satuan kerja DPR dalam menjamin kepatuhan terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik.

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” Pemerintah Indonesia, 2008, <http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-14-Tahun-2008-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik-1552380453.pdf>.

<sup>2</sup> “Peraturan DPR Nomor 1/2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI,” Dewan Perwakilan Rakyat, 2010, <http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-Peraturan-DPR-RI-No.-1-Tahun-2010-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik-di-DPR-RI-1552380559.pdf>.

<sup>3</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ronald Rofiandri, “Memperluas Cakupan Partisipasi dalam Proses Legislasi,” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2015, <https://pshk.or.id/blog-id/memperluas-cakupan-partisipasi-dalam-proses-legislasi>.

### 3. Promosi Transparansi Informasi Publik Parlemen

#### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

- Mengembangkan infrastruktur transparansi parlemen, sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
- Meningkatkan jumlah informasi yang diunggah ke laman web parlemen.
- Menyediakan notulensi rapat dan pertemuan parlemen dalam waktu 3 hari.
- Meningkatkan pelayanan layanan informasi berbasis web (e-PPID).
- Tersedianya alat peringkat transparansi informasi untuk alat kelengkapan dewan (AKD) secara rutin. Komitmen ini akan dijalankan oleh PPID bersama masyarakat sipil.

#### Tahapan Komitmen:

1. *Workshop* tentang pedoman manajemen informasi publik.
2. Pengembangan alat evaluasi.
3. Implementasi alat evaluasi.
4. Peluncuran/peresmian alat peringkat.
5. Revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**Awal Pelaksanaan:** September 2018

**Akhir Pelaksanaan:** Juli 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian			Apakah Membuka Pemerintah?					
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
3. Promosi Transparansi Informasi Publik Parlemen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.					Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.

#### Konteks dan Tujuan

Serupa dengan dua komitmen sebelumnya, komitmen ini hendak mendorong peningkatan akses publik terhadap informasi. Akan tetapi, fokus komitmen ini lebih menasar peningkatan kapasitas DPR dalam menerapkan keterbukaan informasi melalui serangkaian inisiatif pengawasan dan evaluasi kinerja.

Sebelum adanya komitmen ini, DPR telah menginisiasi upaya pengembangan instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat penerapan keterbukaan informasi oleh satuan kerja. Inisiatif tersebut mencapai tahap pengujian alat, namun tidak pernah diinstitutionalisasi, sehingga terjebak dalam ketidakjelasan. Melalui komitmen ini, DPR berharap untuk memperbarui upaya tersebut dengan mengembangkan instrumen evaluasi yang kemudian dilembagakan sebagai mekanisme resmi bagi satuan kerja DPR.

Instrumen evaluasi yang dikembangkan juga akan dibarengi oleh sebuah pedoman umum bagi seluruh pengelola informasi di satuan kerja DPR. Pedoman tersebut mencakup fitur untuk mengawasi publikasi seluruh risalah pertemuan dalam jeda waktu tertentu setelah pertemuan dilaksanakan. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat memiliki akses yang lebih baik pada informasi yang relevan. Di status quo, terdapat ketimpangan antara publikasi risalah pertemuan

dan publikasinya oleh pengelola informasi DPR<sup>1</sup>. Akibatnya, masyarakat seringkali mendapatkan informasi yang tidak lagi relevan.

Untuk menghilangkan ketimpangan publikasi tersebut, DPR telah memulai upaya untuk menerapkan sebuah metode baru untuk pencatatan risalah pertemuan dalam persidangan dan rapat DPR. Metode baru ini memungkinkan pencatat risalah untuk mencatat hanya rangkuman informasi yang relevan terhadap proses pertemuan dan persidangan serta mengesampingkan bagian-bagian yang redundan. Masa uji coba metode baru ini menghasilkan peningkatan publikasi risalah pertemuan yang masif hingga 2.726 persen oleh sebelas Komisi DPR RI dari 183 risalah pada 2016 menjadi 5,171 risalah pada 2017<sup>2</sup>.

Melalui komitmen ini, DPR akan memulai penerapan kebijakan tersebut secara penuh di seluruh satuan kerja dan komisi. Sebagai insentif tambahan, pedoman yang disusun juga akan mencakup skema penghargaan bagi satuan kerja dengan kinerja keterbukaan informasi terbaik. Penilaian kinerja tersebut dilakukan menggunakan instrumen evaluasi yang dikembangkan melalui komitmen ini. Hasil evaluasi tersebut akan melalui peninjauan sebaya<sup>3</sup> oleh staf dan juga anggota DPR dalam menilai kinerja para pengelola informasi DPR.

Di akhir siklus rencana aksi, fokus komitmen ini adalah pengusulan dan pengesahan Perubahan terhadap Peraturan DPR tentang Keterbukaan Informasi. Didukung oleh deklarasi Open Parliament Indonesia, DPR meyakini bahwa peraturan ini penting direvisi.

Komitmen ini memiliki potensi dampak rendah untuk membuka proses parlemen. Potensi tersebut muncul dari uji coba metode baru publikasi risalah pertemuan yang berhasil dengan baik, meskipun kegiatan terkait komitmen ini masih didominasi oleh upaya peningkatan kapasitas internal. Akan tetapi, format risalah pertemuan berupa rangkuman juga menghadirkan masalah baru berupa kemungkinan munculnya celah akibat kekeliruan petugas serta penggunaan format ini untuk menyensor dan membatasi akses publik terhadap informasi tertentu.

### **Langkah Selanjutnya**

Ke depannya, DPR perlu mengutamakan pelaksanaan pelatihan bagi pengelola informasi setiap satuan kerja terkait agar mematuhi pedoman yang dikembangkan. Mengingat salah satu indikator kesuksesan komitmen ini adalah untuk merevisi Peraturan DPR tentang Keterbukaan Informasi, DPR dapat memprioritaskan aspek-aspek berikut untuk disertakan dalam perubahan tersebut:

- Memperbarui daftar informasi publik (DIP) melalui asesmen yang teliti terhadap seluruh jenis informasi yang belum diatur dalam peraturan di status quo. Uji dampak terhadap informasi parlemen dapat menjadi cara bagi DPR untuk mengawal kepatuhan satuan kerja DPR terhadap kebijakan keterbukaan informasi dengan baik.
- Memperbarui peraturan terkait struktur, tugas, dan fungsi PPID DPR agar merefleksikan konteks terbaru yang relevan terhadap kebutuhan dan desakan publik dalam hal keterbukaan informasi.
- Menetapkan prosedur pengelolaan informasi yang terstandar dan jelas bagi seluruh satuan kerja DPR, termasuk standar format dokumen yang dipublikasikan.
- Menambahkan unsur partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi praktik keterbukaan informasi publik di DPR.

---

<sup>1</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

## 4. Perumusan Roadmap Open Parliament Indonesia

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Penyusunan *roadmap* Open Parliament Indonesia (OPI) untuk periode 5 tahun. *Roadmap* ini akan digunakan dalam penyusunan rencana aksi OPI ke depannya.

### Tahapan Komitmen:

1. Survei dasar tentang konstituen.
2. Perumusan dokumen *roadmap*.
3. Diskusi tentang *roadmap* Open Parliament Indonesia.

**Awal Pelaksanaan:** September 2018

**Akhir Pelaksanaan:** Agustus 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
4. Perumusan <i>roadmap</i> Open Parliament Indonesia		✓	✓	✓				✓		Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.					

### Konteks dan Tujuan

Komitmen-komitmen yang disertakan DPR dalam rencana aksi OPI sangat fokus pada upaya peningkatan transparansi parlemen. Fokus ini dapat dipahami sebagai tanggapan terhadap catatan DPR yang selama ini sering dikritik.

Pada 2014, Komisi Informasi Pusat<sup>1</sup> memeringkatkan DPR di posisi ke-12 dalam penilaian kepatuhan institusi publik terhadap keterbukaan informasi publik. Laporan terkait menyatakan bahwa kepatuhan DPR hanya berada di angka 65,5%<sup>2</sup>. Meskipun terdapat laporan KIP serupa di tahun-tahun berikutnya<sup>3</sup>, pemeringkatan yang dipublikasikan tidak menyertakan DPR di dalamnya.

Dalam sebuah wawancara dengan peneliti IRM, Indonesian Parliamentary Center (IPC) menegaskan kebutuhan mereformasi kepatuhan DPR terhadap keterbukaan informasi publik<sup>4</sup>. Tiga komitmen dalam rencana aksi OPI berkaitan dengan peningkatan kepatuhan keterbukaan informasi di tingkat praktik. Sementara itu, komitmen ini disusun untuk mendukung penerapan komitmen-komitmen tersebut di tingkat kebijakan dan strategi. Oleh sebab itu, Peta Jalan Open Parliament Indonesia merupakan komponen kunci dalam pelaksanaan inisiatif parlemen terbuka.

Peta jalan tersebut akan menjangkau periode lima tahunan sesuai dengan siklus penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Peta jalan ini akan digunakan sebagai dokumen strategis yang menjadi Acuan bagi seluruh rencana kerja dan kegiatan keterbukaan parlemen. Di status quo, DPR umumnya masih mengacu pada penggunaan hasil penelitian dan laporan dari berbagai institusi akademis dan penelitian. Untuk menyerap aspirasi publik dan juga mendukung proses parlemen, berbagai aktor dari sektor-sektor terkait akan dilibatkan dalam penyusunan Peta Jalan OPI sesuai dengan amanat partisipasi publik dalam proses parlemen.<sup>5</sup>

Proses penyusunan Peta Jalan OPI juga akan mencakup tahapan survei publik. Melalui survei tersebut, DPR berharap untuk mengumpulkan informasi yang memadai terkait kebutuhan dan

desakan utama masyarakat serta meminta umpan balik untuk menciptakan partisipasi publik yang bermakna dalam proses parlemen<sup>6</sup>. Hasil survei tersebut akan digunakan dalam menentukan arah strategis kebijakan yang dicakup oleh Peta Jalan OPI. Setelah itu, para pihak yang terlibat dalam proses parlemen akan mengadopsi Peta Jalan tersebut dalam mengembangkan strategi-strategi lain yang berkaitan dengan fungsinya masing-masing. Akan tetapi, skala dan ruang lingkup survei ini masih tidak jelas. Oleh sebab itu, sulit untuk menentukan jika proses ini dapat benar-benar membuka peluang bagi aspirasi kelompok-kelompok berbeda dari berbagai sektor untuk disertakan dalam rancangan Peta Jalan OPI.

### Langkah Selanjutnya

DPR dapat menelusuri langkah-langkah berikut dalam pelaksanaan komitmen ini:

- Melakukan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk memperoleh umpan balik dan masukan terkait peningkatan kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik.
- Melakukan konsultasi dengan Sekretariat Nasional OGI untuk mempelajari pengalaman mereka dalam menyusun Peta Jalan Open Government Indonesia.
- Melibatkan komunitas akademik, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, sektor privat, serta kelompok-kelompok yang dipinggirkan dan dengan keterwakilan rendah untuk menangkap aspirasi terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui Peta Jalan OPI,

---

<sup>1</sup> "Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik 2014," Komisi Informasi Pusat, 2014, <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=laporan-hasil-pemeringkatan-2014>, h. 12.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> "Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik Publik 2015," Komisi Informasi Pusat, 2015, <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=keputusan-tentang-hasil-pemeringkatan-keterbukaan-informasi-publik-tahun-2015>; "Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik 2016," Komisi Informasi Pusat, 2016, <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=laporan-hasil-pemeringkatan-2016>; "Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik 2017," Komisi Informasi Pusat, 2017, <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=laporan-hasil-pemeringkatan-2017>.

<sup>4</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

## 5. Mendirikan Lembaga Open Parliament Indonesia

### Teks komitmen sebagaimana tertulis dalam rencana aksi:

Pembentukan Open Parliament Indonesia, beranggotakan anggota dan perwakilan dari Sekretariat Jenderal DPR serta masyarakat sipil.

### Tahapan Komitmen:

1. Perumusan makalah kebijakan tentang lembaga model OPI.
2. Perumusan Surat Keputusan Struktur Organisasi Parlemen Terbuka Indonesia berdasarkan prinsip kolaborasi dan kreasi bersama.
3. Perumusan mekanisme implementasi OPI.
4. *Monitoring* dan evaluasi.
5. Membuat laporan.

**Awal Pelaksanaan:** September 2018

**Akhir Pelaksanaan:** Juni 2020

Ikhtisar Komitmen	Ketajaman		Keterkaitan dengan Nilai OGP (sebagaimana tertulis)				Potensi Dampak				Penyelesaian				Apakah Membuka Pemerintah?				
	Tidak cukup tajam untuk diverifikasi	Cukup tajam untuk diverifikasi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Publik	Akuntabilitas Publik	Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas	Tidak Ada	Rendah	Sedang	Transformatif	Tidak Terlaksana	Terbatas	Substansial	Tuntas	Memburuk	Tidak Mengubah	Sedikit	Banyak	Luar Biasa
5. Mendirikan Lembaga Open Parliament Indonesia		✓		✓					✓				Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.	Ditinjau di akhir siklus rencana aksi.					

### Konteks dan Tujuan

DPR mendeklarasikan inisiatif Open Parliament Indonesia (OPI) pada Agustus 2018<sup>1</sup>. Deklarasi ini mengindikasikan langkah besar dalam kerja sama antarparlemen di Indonesia. Sebelumnya, DPR juga telah aktif dalam kerangka kerja sama internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC).

Tidak lama setelah deklarasi tersebut, DPR melaksanakan ko-kreasi lima komitmen untuk rencana aksi OPI yang merupakan bagian rencana aksi kelima Indonesia. Komitmen kelima ini secara khusus menyoroti penetapan institusi Open Parliament Indonesia untuk mendukung penerapan inisiatif parlemen terbuka.

Menurut keterangan IPC, institusi OPI ini dibutuhkan sebab alasan-alasan berikut<sup>2</sup>:

- Mengawal keberlangsungan penerapan parlemen terbuka dalam jangka panjang, terlepas dari peralihan kepemimpinan di DPR, melalui mekanisme yang mengamankan DPR untuk mengalokasikan anggaran dan menyediakan sumber daya pendukung bagi kegiatan-kegiatan inisiatif parlemen terbuka.
- Memberikan insentif bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam inisiatif parlemen terbuka dengan membentuk mekanisme yang jelas untuk menunjang kolaborasi antara DPR dan masyarakat sipil.
- Mengoordinasikan proses penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi OPI dengan berbagai satuan kerja DPR serta perwakilan masyarakat sipil.

Sebelum membentuk institusi OPI, DPR akan melakukan studi terhadap pelaksanaan inisiatif parlemen terbuka di negara-negara lain bersama masyarakat sipil. Dalam sebuah wawancara, IPC menjelaskan bahwa DPR menelusuri beberapa model untuk pelembagaan OPI<sup>3</sup>. Idealnya, institusi ini akan ditetapkan sebagai sebuah satuan kerja khusus di DPR, seperti halnya pembentukan Dewan Permanen Parlemen untuk Keterbukaan Parlemen<sup>4</sup> oleh Parlemen Georgia. Pembentukan institusi OPI juga perlu diresmikan melalui sebuah Peraturan DPR. Di samping itu, pembentukan mekanisme pelaksanaan inisiatif OPI dapat menciptakan aturan prosedur yang jelas untuk rencana-rencana aksi parlemen terbuka ke depan.

Komitmen ini memiliki potensi dampak yang sedang untuk mengubah lanskap keterlibatan publik dalam proses parlemen serta dalam menciptakan kerangka yang jelas untuk menunjang kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan-tujuan parlemen terbuka. Akan tetapi, mengingat adanya pemisahan mekanisme OGI dengan OPI, maka kerangka kerja OPI juga perlu dibangun dari nol. Hal ini menjadi tantangan sebab Pemilu 2019 setelah rencana aksi diluncurkan dapat menghasilkan perubahan kepemimpinan dan prioritas yang memengaruhi pelaksanaan komitmen.

### Langkah Selanjutnya

Partisipasi dan kepemimpinan Indonesia dalam inisiatif-inisiatif internasional dengan fokus pada pembukaan proses parlemen mengindikasikan komitmen yang baik untuk mengikuti standar global untuk keterbukaan dan transparansi. Pada November 2018, misalnya, Wakil Ketua DPR Periode 2014–2019 Fadli Zon bertemu dengan Anthony Smith, Direktur Eksekutif Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Kedutaan Besar Indonesia di London.<sup>5</sup> Dalam pertemuan tersebut, WFD menegaskan niatnya untuk terus melanjutkan kemitraan dengan DPR dalam program penguatan transparansi dan partisipasi publik dengan parlemen di Indonesia.

Untuk mencapai hasil terbaik dalam pelaksanaan komitmen ini, DPR harus melanjutkan berbagai kemitraan-kemitraan seperti ini. Bukan hanya karena kemitraan dengan organisasi internasional membuka peluang bagi DPR untuk menjadi bagian dari forum global dengan tujuan serupa, namun juga karena DPR dapat mempelajari praktik-praktik terbaik dan kegagalan yang dialami parlemen di negara-negara lain. Dengan begitu, parlemen dapat menjamin terlaksananya parlemen terbuka yang efektif dan tepat guna di Indonesia.

Lebih lanjut, DPR dapat mengambil langkah-langkah berikut dalam pelaksanaan komitmen ini:

- Menelusuri kemungkinan untuk mengharmoniskan proses OPI dengan proses Sekretariat Nasional OGI agar dapat berkolaborasi dalam pembentukan standar acuan bersama.
- Melaksanakan konsultasi dengan Sekretariat Nasional OGI untuk mempelajari pengalaman mereka dalam mengoordinasikan proses OGP serta dalam menyusun Strategi Nasional Sekretariat Nasional OGI.
- Mereplikasi mekanisme yang konsisten dengan model forum multipihak OGP untuk memperoleh dan menguatkan dukungan dari pejabat pimpinan DPR dalam inisiatif parlemen terbuka.

---

<sup>1</sup> "Open Parliament Dekatkan DPR dengan Rakyat," Dewan Perwakilan Rakyat, 2018, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/21853/t/Open+Parliament+Dekatkan+DPR+Dengan+Rakyat>.

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi (Indonesian Parliamentary Center), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Maret 2019.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> "Open Governance Permanent Parliamentary Council," Parlemen Georgia, diakses pada Maret 2019, <http://www.parliament.ge/en/saparlameto-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-8/ppcotg>.

<sup>5</sup> Pugh Hariyanto, "DPR RI dan WFD Sepakat Dukung Keterbukaan Parlemen di Level Global," Sindo News, <https://nasional.sindonews.com/read/1355398/12/dpr-ri-dan-wfd-sepakat-dukung-keterbukaan-parlemen-di-level-global-1542384983>.